



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir.ARIEF DJATMIKO, MA

NIP : 19660801 199603 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Alamat Kantor : Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 belum memiliki data yang tercantum dalam Form Lampiran II (Output & Outcome) Penyelenggara Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Dan Fungsi Penunjang Aspek Tingkat Capaian Kinerja Untuk Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan Rincian sebagai berikut :

A. IKK OUTPUT

No IKK	IKK	Capaian Kinerja Tahun 2020	Keterangan
1	2	3	4
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
4.14.9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	N/A	Data Belum Tersedia karena belum ada pendataan di Tahun 2020. Rencana kegiatan pendataan akan dilaksanakan Tahun 2021.
4.15.1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	N/A	Data Belum Tersedia karena belum ada pendataan di Tahun 2020 baik yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun Disperakim Provinsi Jawa Tengah
4.15.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	N/A	Data Belum Tersedia karena belum ada pendataan di Tahun 2020 baik yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun Disperakim Provinsi Jawa Tengah
4.17.2	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan pusat. Sampai saat ini Pemerintah Pusat belum melakukan sertifikasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah

No IKK	IKK	Capaian Kinerja Tahun 2020	Keterangan
1	2	3	4
			serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga belum melakukan sertifikasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. Hal ini juga disebabkan karena belum ada juknis dari Pusat
4.17.2	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan pusat terkait dengan penyuluhan dan pelatihan pada pengembang/ badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. Tetapi materi terkait hal tersebut diatas hingga saat ini belum disediakan oleh Kementerian PUPR
10	Urusan Pertanahan		
10.38.1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	N/A	a. Data TIDAK tersedia karena bukan TUPOKSI DISPERAKIM dan ditangani oleh OPD lain b. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanah dimaksud harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
10.38.3	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	N/A	Data TIDAK tersedia karena bukan TUPOKSI DISPERAKIM dan ditangani oleh OPD lain
10.38.4	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	N/A	Data TIDAK tersedia karena bukan TUPOKSI DISPERAKIM dan ditangani oleh OPD lain

B. IKK OUTCOME

No IKK	IKK	Satuan	Rumus/ Persamaan	Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
4.15	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	NA	Data Belum Tersedia karena 2020 belum pernah menangani relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	NA	
10.	Urusan Pertanian				
10.38	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yg diterbitkan	%	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	NA	a. Data TIDAK tersedia karena bukan TUPOKSI DISPERAKIM dan ditangani oleh OPD lain b. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bawah Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanah dimaksud harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat
			Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	NA	
10.40	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/ Kota	%	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota	NA	a. Data TIDAK tersedia karena bukan TUPOKSI DISPERAKIM dan ditangani oleh OPD lain b. Merujuk pada Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya.
			Luas izin lokasi yang diterbitkan	NA	

No IKK	IKK	Satuan	Rumus/ Persamaan	Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; Rencana Strategis; dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Semarang, Maret 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19660801 199603 1 004